DAFTAR ISIAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa: MERBAU
Kecamatan: KLUMBAYAN BARAT
Kabupaten: KABUPATEN TANGGAMUS
Provinsi: LAMPUNG
Bulan: 2

Tahun: 2023

Nama Pengisi: LIAUDIN Pekerjaan: Perangkat Pekon/ Perangkat Des Jabatan: Kepala Urusan TU dan Umum Kepala Desa / Lurah: ROHADI

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : Peta Rupa bumi Indonesia NLP 1110-13 Skala 1: 50000 Referensi 2: Peta Administrasi Kabupaten Tanggamus Sekala 1:250000 Referensi 3: Peta sketsa Desa/Pekon Merbau Referensi 4: Citra Satelit Google,Liputan 14 desember 2015

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Total nilai bahan penolong yang digunakan

A. Jumlah Penduduk													
Jumlah											Jeni	s Kelamin	
Junian									La	ki-laki			Perempuan
Jumlah penduduk tahun												998 orang	968 orai
lumlah penduduk tahun												997 orang	964 orai
Persentase perkembang	an											0.1 %	0.41
3. Jumlah Keluarga													
lumlah						KK La	ki-laki				KK P	erempuan	Jumlah Tot
lumlah Kepala Keluarga	tahun ini					5´	10 KK					49 KK	559 k
umlah Kepala Keluarga						50	08 KK					47 KK	555 k
Prosentase Perkembang							.39 %					4.26 %	
. EKONOMI MASYARA	KAT												
A. Pengangguran													
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)						1649	orang						
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja						0 ora							
. Jumlah penduduk usia										0 ora			
. Jumlah penduduk usia	18-56 tah	un yang	bekerja pe	nuh						0 ora			
. Jumlah penduduk usia	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu 0 orang												
8. Jumlah penduduk usia	18-56 tah	un yang	cacat dan t	idak be	kerja		0 orang						
'. Jumlah penduduk usia	18-56 tah	un yang	cacat dan l	oekerja						0 ora	ng		
. Kesejahteraan Kelua													
. Jumlah keluarga prase										_	eluarg		
. Jumlah keluarga sejah									246 keluarga				
. Jumlah keluarga sejah								15 keluarga 50 keluarga					
. Jumlah keluarga sejah										_			
5. Jumlah keluarga sejah 5. Total jumlah kepala ke		;									luarga eluarg		
I. PRODUK DOMESTIK		LURAH	IAN BRUTO)									
A. SUBSEKTOR PERTA		alo do a !	Hasil Prod	de de at	NULL	de de al	D:						Diama Islamus
Tanaman	Luas Pro (Ha		(Ton/H		Nilai prod (Rp)		ыауа	pemupuka (Rp)	Biay	/a bibit	(Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
			I										
B. SUBSEKTOR PERKE		alcolor:	Hasil Pro	-111	N 111 - 1	alcoloni	D:		F	N I-	11.14	Diama abat	Diama lainana
Tanaman	Luas Pro (Ha		(Ton/H		Nilai pro (Rp		ыауа	pemupuka (Rp)	an Biaya bibit (Rp)		Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)	
:. SUBSEKTOR PETER	NAKAN												
							Τ.		D 1	N	ilai Ba	han Penolong yg	
Jenis Produksi Hasil		l Produksi Nilai produksi (Rp)			Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)		digunakan (Rp)		Jumlah Ternak (Ekor)				
SUBSEKTOR PERIK	ΔΝΔΝ					l			Jilai Bah	an Per	nolona	Total biaya antar	al
. SUBSEKTOR PERIK								Doku va li					
. SUBSEKTOR PERIKA Jenis Produksi	Ha	sil Prod ſon/Tahı		ai prodi	uksi (Rp)	Nilai B digu	anan unakar			gunak (Rp)	an 	yang dihabiskar (Rp)	perikanan
Jenis Produksi	Ha (1	Ton/Tahu	un) Nii	ai produ	uksi (Rp)						an ———		1 I
	Ha (1	Ton/Tahu	un) Nii	ai prodi	uksi (Rp)						an 		perikanan

Rp. 2.000.000,00

Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 17.000.000,00
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada	3 jenis
Januar Gata Jone Bartan tambang dan ganar yang dad	o jerne
F. SUBSEKTOR KERAJINAN	
Total nilai produksi tahun ini	Rp. 25.000.000,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 1.500.000,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 550.000,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 1.500.000,00
Total jenis kerajinan rumah tangga	2 jenis
Total Jenis Kerajinan ruman tangga	2 jenis
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN	
G.1. Subsektor Industri Pangan	
Total nilai produksi tahun ini	Rp. 29.000.000,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 0,00
Total jumlah jenis industri tsb yang ada	
Total jurilari jeriis industri isb yang ada	0 jenis
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN	
Total nilai produksi tahun ini	Rp. 24.000.000,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 5.000.000,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 3.000.000,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 28.000.000,00
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	
I.1. Subsektor Perdagangan Besar	
Total nilai transaksi	Rp. 21.000.000,00
Total nilai aset perdagangan yang ada	Rp. 40.000.000,00
Total jumlah jenis perdagangan besar	Rp. 2,00
Total hiaya yang dikeluarkan	Rp. 60.000.000,00
Total biaya antara lainnya	Rp. 20.000.000,00
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran	
Jumlah total jenis perdagangan eceran	10 jenis
Total nilai transaksi	Rp. 20.000.000,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp. 40.000.000,00
Total nilai aset perdagangan eceran	Rp. 65.000.000,00
Total fillal aset perdagangan eceran	Kp. 65.000.000,00
I.3. Subsektor Hotel	
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada	0 jenis
Jumlah total pendapatan	Rp. 0,00
Jumlah total biaya pemeliharaan	Rp. 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 0,00
Julian total pendapatan yang diperolen	κρ. 0,00
I.4. Subsektor Restoran	
Jumlah tempat penyediaan konsumsi	0 Unit
Biaya konsumsi yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya antara lainnya	Rp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 0,00
J. Sektor Bangunan/Konstruksi	
Jumlah bangunan yang ada tahun ini	4 unit
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	Rp. 80.000.000,00
Total nilai bangunan yang ada	Rp. 700.000.000,00
Biaya antara lainnya	Rp. 700.000.000,00
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	
K. Sektor Redailgan, Persewaan dan Sasa Perusahaan	
K.1. Subsektor Bank	
K.1. Subsektor Bank	Rp. 0.00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan	Rp. 0,00 Rp. 0.00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan	
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00 Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00 Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00 Rp. 0,00 0 Unit 0 Jenis
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00 Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00 Rp. 0,00 0 Unit 0 Jenis
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00 Rp. 0,00 0 Unit 0 Jenis Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 0 Unit 0 Jenis Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 0 Unit 0 Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	Rp. 0,00 Rp. 0,00 0 Unit 0 Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 0 unit
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai	Rp. 0,00 Rp. 0,00 0 Unit 0 Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 0 unit Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 O Unit O Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 O unit Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai	Rp. 0,00 Rp. 0,00 0 Unit 0 Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 0 unit Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai Biaya yang dikeluarkan Biaya lainnya	Rp. 0,00 Rp. 0,00 O Unit O Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 O unit Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 O Unit O Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 O unit Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai Biaya yang dikeluarkan Biaya lainnya K.4. Subsektor Jasa Perusahaan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 O Unit O Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 O unit Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai Biaya yang dikeluarkan Biaya lainnya K.4. Subsektor Jasa Perusahaan Jumlah perusahaan jasa	Rp. 0,00 Rp. 0,00 O Unit O Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 O unit Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Ap. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai Biaya yang dikeluarkan Biaya lainnya K.4. Subsektor Jasa Perusahaan Jumlah perusahaan jasa Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp. 0,00 Rp. 0,00 O Unit O Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 O unit Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Ap. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai Biaya yang dikeluarkan Biaya lainnya K.4. Subsektor Jasa Perusahaan Jumlah perusahaan jasa	Rp. 0,00 Rp. 0,00 O Unit O Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 O unit Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Ap. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00

Untitled Document

L. SEKTOR JASA-JASA		
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum		
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat		10 unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat		Rp. 29.000,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan		Rp. 27.000,00
L.2. Subsektor jasa swasta		
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat		0 jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial		Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan		Rp. 0,00
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi		
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi		0 jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi		Rp. 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan		Rp. 0,00
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga		
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga		5 jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga		Rp 52.000.000,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga		Rp 65.000,00
Biaya antara yang dikeluarkan		Rp 40.000,00
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI		
M.1. Subsektor Angkutan		
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, ud	ara dan	
sungai/danau/penyeberangan	ara, uali	3 Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan		30 Unit
Nilai total transaksi pengangkutan		Rp 200.000,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan		Rp 600.000,00
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM		
,		
N.1. Subsektor Listrik		
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik		1 Jenis
Jumlah nilai produksi listrik		Rp 1,00
Jumlah total nilai transaksi		Rp 3.000.000,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan		Rp 1.500.000,00
N.2. Subsektor Gas		
Jumlah kegiatan penyediaan gas		1 jenis
Nilai aset produksi gas		Rp 1,00
Nilai transaksi		Rp 25.000,00
Biaya antara yang dikeluarkan		Rp 25.000,00
,		
N.3. Subsektor Air Minum		
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum		1 jenis
Nilai aset penyediaan air minum		Rp 1,00
Nilai produksi air minum		Rp 1,00
Nilai transaksi air minum		Rp 5.000,00
Biaya antara yang dikeluarkan		Rp 4.000,00
IV. PENDAPATAN PERKAPITA		
A Danidan stan mada Managarita managarita da Managarita		
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha		
A.1. Industri kecil, menengah dan besar		
1. Jumlah rumah tangga	510 Kelua	rga
Jumlah total anggota rumah tangga	519 orang	<u> </u>
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	30 Keluar	
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	59 orang	
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 450,00	
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA		
Jumlah Kepala Keluarga	555 KK	
Jumlah Anggota Keluarga	496 orang	
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp 3.000.0	
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 2.000.0	000,00
V STRUKTUR MATA RENCALIARIAN MENURUT SEKTOR		
V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR		
1. Sektor Pertanian		
	00 orang	
	orang	
Buruh Tani 19		
)0 orang	
	00 orang	
Pemilik Usaha Tani 20	00 orang	
Pemilik Usaha Tani 20 2. Sektor Perkebunan		
Pemilik Usaha Tani 20 2. Sektor Perkebunan Karyawan Perusahaan Perkebunan 20) orang	
Pemilik Usaha Tani 20 2. Sektor Perkebunan Karyawan Perusahaan Perkebunan 20 Buruh perkebunan 30) orang) orang	
Pemilik Usaha Tani 20 2. Sektor Perkebunan Karyawan Perusahaan Perkebunan 20 Buruh perkebunan 30) orang	

Untitled Document

3. Sektor Peternakan

Peternakan Perorangan		
•	60 orang	
Buruh Usaha Peternakan	40 orang	
Pemilik Usaha Peternakan	13 orang	
4. Sektor Perikanan		
Nelayan	0 orang	
Buruh Usaha Perikanan	6 orang	
Pemilik Usaha Perikanan	3 orang	
F. Oalden Kabudanan		
5. Sektor Kehutanan		
Pengumpul Hasil Hutan	40 orang	
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	11 orang	
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	10 orang	
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C		
Penambang Galian C Perorangan	1 orang	
Buruh Usaha Pertambangan	2 orang	
Pemilik Usaha Pertambangan	1 orang	
•		
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga		
7. Sektor maustri kecii & kerajinan kuman rangga		
8. Sektor Industri Menengah dan Besar		
Karyawan perusahaan swasta	2 orang	
9. Sektor Perdagangan		
	E4	
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	51 orang	
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	15 orang	
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	12 orang	
10. Sektor Jasa		
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	5 orang	
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	2 orang	
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	45 orang	
Pegawai Negeri Sipil	8 orang	
Dukun/paranormal/supranatural	3 orang	
Guru swasta	15 orang	
Pembantu rumah tangga	50 orang	
**		
Sopir	10 orang	
Buruh migran perempuan	143 orang	
Buruh migran laki-laki	100 oranç)
Usaha jasa pengerah tenaga kerja	4 orang	
Wiraswasta lainnya	100 orang	
Tidak mempunyai matapencaharian tetap	764 orang	9
Tidak mempunyai matapencaharian tetap Jasa penyewaan peralatan pesta	764 orang 2 orang	
]
		3
Jasa penyewaan peralatan pesta		3
Jasa penyewaan peralatan pesta VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT		
Jasa penyewaan peralatan pesta VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT		
Jasa penyewaan peralatan pesta VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH		10 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah		10 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha		
Jasa penyewaan peralatan pesta /I. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha		10 orang 17 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta /I. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta /I. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 0 orang
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 0 orang
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 3 orang 30 orang
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 3 orang 30 orang 2 orang
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 3 orang 30 orang 2 orang
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 3 orang 30 orang 2 orang
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 3 orang 30 orang 2 orang
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 3 orang 30 orang 2 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta /I. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 0 orang 3 orang 3 orang 2 orang 0 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta /I. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 3 orang 30 orang 2 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta JI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki ojek		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 0 orang 3 orang 3 orang 2 orang 0 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta JI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki ojek		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 3 orang 2 orang 3 orang 30 orang 2 orang 0 orang 1 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta JI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki ojek C. ASET SARANA PRODUKSI Memiliki penggilingan padi		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 3 orang 2 orang 3 orang 30 orang 2 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 1 orang 1 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta Ji. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki ojek C. ASET SARANA PRODUKSI Memiliki tanah padi Memiliki traktor		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 0 orang 3 orang 3 orang 2 orang 0 orang 1 orang 1 orang 3 orang 1 orang 3 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta J. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki ojek C. ASET SARANA PRODUKSI Memiliki penggilingan padi Memiliki traktor Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 0 orang 3 orang 2 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta Ji. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki ojek C. ASET SARANA PRODUKSI Memiliki traktor Memiliki traktor Memiliki kapal penangkap ikan		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 0 orang 3 orang 3 orang 2 orang 0 orang 1 orang 1 orang 3 orang 1 orang 3 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta JI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki tarakor Memiliki papariki pengolahan hasil pertanian Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal pengolahan hasil perikanan		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 0 orang 3 orang 2 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta JI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki tarakor Memiliki papariki pengolahan hasil pertanian Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal pengolahan hasil perikanan		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 0 orang 3 orang 3 orang 2 orang 1 orang 1 orang 3 orang 3 orang 1 orang 3 orang 3 orang 3 orang 76 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta JI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 1,0 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki tanah penangkap ikan Memiliki tapal penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal pengolahan hasil pertanan Memiliki alat pengolahan hasil pertanan Memiliki alat pengolahan hasil pertanan		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 0 orang 3 orang 2 orang 4 orang 1 orang 1 orang 3 orang 1 orang 2 orang 1 orang 3 orang 3 orang 3 orang 76 orang 1 orang-1 unit
Jasa penyewaan peralatan pesta JI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki ojek C. ASET SARANA PRODUKSI Memiliki penggilingan padi Memiliki traktor Memiliki padi penangkap ikan Memiliki kalat pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil peternakan Memiliki alat pengolahan hasil peternakan		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 0 orang 3 orang 2 orang 2 orang 1 orang 3 orang 3 orang 1 orang 0 orang 0 orang 0 orang 76 orang 1 orang-1 unit
Jasa penyewaan peralatan pesta Ji. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,01-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki tanah nasil pertanian Memiliki padi pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil perikanan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil hutan		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 0 orang 0 orang 0 orang 3 orang 2 orang 4 orang 1 orang 0 orang 3 orang 3 orang 1 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang 3 orang 1 orang 1 orang 1 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta J. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 — 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 — 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 — 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki pengilingan padi Memiliki pengilingan padi Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki alat pengolahan hasil perternakan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 3 orang 3 orang 2 orang 4 orang 1 orang 0 orang 3 orang 2 orang 0 orang 0 orang 76 orang 1 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki peggilingan padi Memiliki paprik pengolahan hasil pertanian Memiliki tapal penangkap ikan Memiliki alat pengolahan hasil pertenakan Memiliki alat pengolahan hasil pertenakan Memiliki alat pengolahan hasil peternakan Memiliki alat pengolahan hasil pertenakan Memiliki alat pengolahan hasil pertenabangan Memiliki alat pengolahan pengolah hasil pertambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 3 orang 3 orang 2 orang 4 orang 1 orang 0 orang 3 orang 1 orang 0 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang 3 orang 1 orang 1 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 1 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta J. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah tana tara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah tobih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki pada penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki alat pengolahan hasil perikanan Memiliki alat pengolahan hasil perikanan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 3 orang 3 orang 2 orang 4 orang 1 orang 0 orang 3 orang 1 orang 3 orang 3 orang 1 orang
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT A. ASET TANAH Tidak memiliki tanah Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha		10 orang 17 orang 0 orang 2 orang 4 orang 7 orang 1 orang 0 orang 3 orang 3 orang 2 orang 4 orang 1 orang 0 orang 3 orang 1 orang 0 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang 3 orang 1 orang 1 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 1 orang

D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING		
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING Tembok		399 rumah
Kayu		120 rumah
, w _j =		
RUMAH MENURUT LANTAI		
Keramik		300 rumah
Semen		288 rumah
J		2 rumah
ah		20 rumah
RUMAH MENURUT ATAP		
Genteng		400 rumah
Seng		10 rumah
Asbes		12 rumah
Beton		22 rumah
VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA		
Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya		479 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya		355 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya		10 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak kecil		278 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki hiasan emas/berlian		123 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank		387 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah		213 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha perkebunan		299 Keluarga
VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT		
Tim I Edulution into initalial		
A. Tingkat Pendidikan Penduduk		
	20 orang	
	59 orang	
	1 orang	
	159 orang	
	490 orang	
	40 orang 287 orang	
	87 orang	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	130 orang	
	196 orang	
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	150 orang	
	60 orang	
	0 orang	
·	0 orang	
·	7 orang	
·	0 orang	
·	0 orang	
	6 orang 20 orang	
'	20 orang 0 orang	
	0 orang	
· ·	0 orang	
	0 orang	
·	0 orang	
	0 orang	
·	0 orang	
	0 orang	
·	0 orang	
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	0 orang	
B. Wajib belajar 9 tahun		
	300 orang	
·	281 orang	
	1 orang	
C. Rasio Guru dan Murid		
	4 orang	
	70 orang	
	16 orang	
	321 orang 21 orang	
	21 orang 300 orang	
	11 orang	
	32 orang	
,	0 orang	
10. Jumlah guru SLB	0 orang	
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat		
	1 unit	
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan	0 unit	
1 1	0 unit	
	0 unit	
	2 kegiatan	
·	0 kelompok	
	0 orang	
Jumlah kelompok belajar Paket B	0 kelompok	

lumlah Peserta ujian Paket P		0 orang
Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C		0 orang 0 kelompok
Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C		0 kelompok 20 orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan		20 orang 0 unit
Jumlah peserta kursus keterampilan		0 orang
burnian posetta kursus keterampilan		o drang
IX. KESEHATAN MASYARAKAT		
A. Kualitas Ibu Hamil		
Jumlah ibu hamil	21 orang	
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	21 orang	
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	5 orang	
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	0 orang	
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	0 orang	
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	0 orang	
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	0 orang	
Jumlah kematian ibu hamil	0 orang	
Jumlah ibu hamil melahirkan	13 orang	
Jumlah ibu nifas	0 orang	
Jumlah kematian ibu nifas	0 orang	
Jumlah ibu nifas hidup	12 orang	
B. Kualitas Bayi		
Jumlah keguguran kandungan	0 orang	
Jumlah bayi lahir	13 orang	
Jumlah bayi lahir mati	0 orang	
Jumlah bayi lahir hidup	0 orang	
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	0 orang	
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang	
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	0 orang	
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan	0 orang	
mental	+ -	
C. Kualitas Persalinan		
Tempat Persalinan	la	
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	0 unit	
Tempat persalinan Rumah Bersalin	4 unit	
Tempat persalinan Puskesmas	5 unit	
Tempat persalinan Polindes	1 unit	
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit	
Tempat persalinan rumah praktek bidan	18 unit	
Tempat praktek dokter	0 unit	
Rumah dukun	6 unit	
Rumah sendiri	13 unit	
Pertolongan Persalinan	4.6	
Jumlah Persalinan ditolong Dokter Jumlah persalinan ditolong bidan	4 tindakan	
	23 tindakan	
Jumlah persalinan ditolong perawat Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0 tindakan 7 tindakan	
	2 tindakan	
Jumlah persalinan ditolong keluarga	2 undakan	
D. Coltumora Imagesia		
D. Cakupan Imunisasi	0	
Jumlah Bayi usia 2 bulan	0 orang	
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 Jumlah bayi usia 3 bulan	6 orang	
·	0 orang	
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 Jumlah bayi usia 4 bulan	0 orang 0 orang	
Jumlah bayi usla 4 bulan Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	8 orang	
Jumlah bayi 9 bulan	0 orang	
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	0 orang	
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	0 orang	
	,	
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB		
Pasangan Usia Subur		
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	130 orang	
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	0 orang	
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	0 orang	
Jumlah pasangan usia subur	0 pasangan	
	pasangan	
Keluarga Berencana	1	
produciga Defendana	0 orang	
Jumlah aksentor KB	Journalia	
Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	1	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	0 orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	0 orang 0 orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	0 orang 0 orang 0 orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	0 orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0 orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0 orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	0 orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	0 orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	0 orang	

		Untitled Document		
lumlah kejadian dalam 1 tahun ini		0 kejadian		
lumlah yang meninggal		0 kejadian		
spa				
lumlah kejadian dalam 1 tahun ini		4 kejadian		
lumlah yang meninggal		0 kejadian		
G. Angka Harapan Hidup				
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan		0,00 Tahun		
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota		0,00 Tahun		
Angka Harapan Hidup Provinsi		0,00 Tahun		
Angka harapan Hidup Nasional		0,00 Tahun		
I. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih				
. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali		400 Keluarga		
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM		20 Keluarga		
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan		0 Keluarga		
. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa		0 Keluarga		
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran		0 Keluarga		
5. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum		0 Keluarga		
/. Jumlah keluarga menggunakan air sungai		7 Keluarga		
3. Jumlah keluarga menggunakan embung		0 Keluarga		
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air		118 Keluarga		
0. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air		0 Keluarga		
1. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sur	mber di	0 Keluarga		
itas Total jumlah kaluarga				
otal jumlah keluarga		587 Keluarga		
. Perilaku hidup bersih dan sehat				
Kebiasaan buang air besar				
lumlah keluarga memiliki WC yang sehat		400 Keluarga		
lumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehat		30 Keluarga		
lumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan		59 Keluarga		
lumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum		19 Keluarga		
Pola makan				
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali		Ada		
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali		Ada		
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali		Ada		
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali		Ada		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali		Tidak		
Kebiasaan berobat bila sakit				
Dukun Terlatih		Sedikit		
Ookter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu		Sedikit		
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif		Sedikit		
Paranormal		Sedikit		
Obat tradisional dari keluarga sendiri		Sedikit		
idak diobati		Tidak ada		
idak diobati				
Deleter Old Bullie				
I. Status Gizi Balita		0.4		
lumlah Balita		21 orang		
lumlah Balita bergizi buruk		0 orang		
lumlah Balita bergizi baik		21 orang		
lumlah Balita bergizi kurang		0 orang		
lumlah Balita bergizi lebih		0 orang		
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini				
Jenis penyakit		Jumlah pende	rita	Di rawat di
	0 orang			Puskesmas
Ginjal	4 orang			Puskesmas
Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat				
lumlah MCK Umum			4 unit	
lumlah Posyandu			2 unit	
lumlah kader Posyandu aktif			25 orang	
lumlah pembina Posyandu			2 orang	
			66 Dasawisma	
lumlah Dasawisma			9 orang	
lumlah pengurus Dasa Wisma aktif			13 orang	
lumlah pengurus Dasa Wisma aktif lumlah kader bina keluarga balita aktif			4 orang	
lumlah pengurus Dasa Wisma aktif lumlah kader bina keluarga balita aktif lumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif			Diisi	
lumlah pengurus Dasa Wisma aktif lumlah kader bina keluarga balita aktif lumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu			Diloi	
lumlah pengurus Dasa Wisma aktif lumlah kader bina keluarga balita aktif lumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu			9999	
lumlah pengurus Dasa Wisma aktif lumlah kader bina keluarga balita aktif lumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu				
lumlah pengurus Dasa Wisma aktif lumlah kader bina keluarga balita aktif lumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu			9999 Diisi 5 jenis	
lumlah pengurus Dasa Wisma aktif lumlah kader bina keluarga balita aktif lumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu			9999 Diisi	
lumlah pengurus Dasa Wisma aktif lumlah kader bina keluarga balita aktif lumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya			9999 Diisi 5 jenis	
lumlah pengurus Dasa Wisma aktif lumlah kader bina keluarga balita aktif lumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya			9999 Diisi 5 jenis 5 jenis	
lumlah pengurus Dasa Wisma aktif lumlah kader bina keluarga balita aktif lumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya lumlah kegiatan Posyandu lumlah kader kesehatan lainnya			9999 Diisi 5 jenis 5 jenis 6 orang	
lumlah pengurus Dasa Wisma aktif lumlah kader bina keluarga balita aktif lumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya lumlah kegiatan Posyandu lumlah kader kesehatan lainnya			9999 Diisi 5 jenis 5 jenis 6 orang 7 jenis 0 jenis	
lumlah pengurus Dasa Wisma aktif lumlah kader bina keluarga balita aktif lumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya lumlah kegiatan Posyandu lumlah kader kesehatan lainnya lumlah kegiatan pengobatan gratis			9999 Diisi 5 jenis 5 jenis 6 orang 7 jenis	

1/02/23 16.37 Untitled Document	
A. Konflik SARA	
Kasus konflik pada tahun ini	0 kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga	0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW	0 kasus
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	0 kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain	0 kasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	Rp 0,00
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara	1
	0 orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah janda akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
B. Perkelahian	1
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	kasus
	+
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	orang
C. Pencurian	
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah	
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk	0.1
	0 kasus
setempat	o Rasas
setempat	
	0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya	0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat	
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan	0 kasus 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	0 kasus 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba	0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah kasus mabuk akibat Miras	0 kasus 0 orang 0 buah 0 orang 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah kasus mabuk akibat Miras Jumlah pengedar Narkoba	0 kasus 0 orang 0 toang 0 buah 0 orang 0 kasus 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah kasus mabuk akibat Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	0 kasus 0 orang 0 buah 0 orang 0 kasus 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	0 kasus 0 orang 0 buah 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah warung/toko yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah warung/toko yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	0 kasus 0 orang 0 sasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat tumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi	0 kasus 0 orang 0 buah 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 rang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	0 kasus 0 orang 0 sasus 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 tasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 tasus 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/koko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 kasus 0 orang 0 buah 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 tasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 tasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengeduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah kasus/konfilik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 kasus 0 orang 0 buah 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 buah 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/koko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 kasus 0 orang 0 buah 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 tasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 tasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengdar Narkoba Jumlah pengdar Narkoba Jumlah pengdar Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah pemertiban penyediaan tempat prostitusi Jumlah pemertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kasus 0 orang 0 buah 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 buah 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus senipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kasus 0 orang 0 buah 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 buah 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakalan Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengdar Narkoba Jumlah pengdar Narkoba Jumlah pengdar Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah pembunaan pelaku prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah pemertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 tasus 0 orang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus senipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengdar Narkoba yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah penbinaan pelaku prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kasus 0 orang 0 sasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 tasus 0 orang 0 kasus 0 basus 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dli) Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah penbinaan pelaku prostitusi Jumlah penbinaan pelaku prostitusi Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi H. Pembunuhan Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 tasus 0 orang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakalan Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah kasus/konfik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 kasus 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus 0 kali 0 kasus 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah penduduk yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dli) Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi H. Pembunuhan Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus 0 orang 0 sasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 hasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus 0 kali 0 kasus 0 kasus 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah pembunahan pelaku prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah penertiban penyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dli) Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk setempat	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 kasus 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus 0 kali 0 kasus 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengdera Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prositiusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prositiusi Jumlah pembinaan pelaku prositiusi Jumlah pemetriban penyediaan tempat prositiusi Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus yang Diproses secara hukum	0 kasus 0 orang 0 sasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 hasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus 0 kali 0 kasus 0 kasus 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Markoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Markoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Markoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Markoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Markoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Markoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Markoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Markoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Markoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dili) Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah pemeriban penyediaan tempat prostitusi Jumlah peneriban penyediaan tempat prostitusi Jumlah peneriban penyediaan tempat prostitusi Jumlah peneriban penyediaan tempat penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus 0 orang 0 buah 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus 0 kali 0 kali 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah penerban penyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah pembunaan pelaku prostitusi Jumlah penerban penyediaan tempat prostitusi Jumlah penerban penyediaan tempat prostitusi Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus 0 orang 0 buah 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus 0 kali 0 kali 0 kasus 0 kasus 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memliki kebasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Keturahan ini Jumlah kasus senjuban dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah warung/toko yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah pengdara Narkoba Jumlah pengdara Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah bempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dli) Jumlah hempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dli) Jumlah penertiban penyediakan tempat prostitusi Jumlah penertiban penyediakan tempat prostitusi Jumlah kasus/konfik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah pengdar Narkoba Jumlah pengdar Narkoba Jumlah pengdar Narkoba Jumlah kasus mabuk akibat Miras Jumlah kasus mabuk/keler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah penduduk pang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Markoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah kasus-konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk besa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk Setempat	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 buah 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Keturahan ini Jumlah kasus senjuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang mengkonsumsi Miras Jumlah warung/toko yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus sematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah pengat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dli) Jumlah hempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dli) Jumlah penertiban penyediakan tempat prostitusi Jumlah penertiban penyediakan tempat prostitusi Jumlah kasus konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah pengdar Narkoba Jumlah pengdar Narkoba Jumlah pengdar Narkoba Jumlah kasus mabuk akibat Miras Jumlah kasus mabuk/keler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah penduduk pang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Markoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah kasus-konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk besa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk Setempat	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 buah 0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah pengdar Narkoba Jumlah pengdar Narkoba Jumlah pengdar Narkoba Jumlah kasus mabuk akibat Miras Jumlah kasus mabuk/keler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah penduduk pang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Markoba yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah kasus-konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk besa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk Setempat	0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 buah 0 kasus

/UZ/23 16.37 Untitled Document	
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	0 kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	0 unit
K. Masalah Kesejahteraan Sosial	
Jumlah gelandangan	0 orang
Jumlah pengemis jalanan	0 orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	0 orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	0 orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	0 orang
Jumlah orang cacat fisik	0 orang
Jumlah orang kelainan kulit	0 orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	0 orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	0 unit
Jumlah panti jompo	0 unit
Jumlah panti asuhan anak	0 unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan	0 unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	0 orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	0 orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	0 orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	0 orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	0 orang
Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	20 orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	15 orang
Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun	6 orang
Jumlah janda	30 orang
Jumlah duda	0 orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	0 orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat	0 orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat	4 orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat	11 orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	0 orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	18 orang
Jumlah penduduk eks NAPI	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan	52 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	0 orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	0 orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk	8 orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	0 orang
L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	lo .
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	0 kasus
M. Teror dan Intimidasi	
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan pend	
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum for	mal 0 kasus
1 D. L.	
N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta	
Organisasi Siskamling	Ada
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat	Tidak
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamlimg/Pos Ronda	9 RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas	5 orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda	Ada
Buku anggota Hansip dan Linmas	4 jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta	0 unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah	2 kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	4 Pos
XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT	
A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara	4.5
	1 jenis
<u> </u>	1 kegiatan
	1 jenis
	1 kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 jenis

	1. Peraturan	Desa 0 buah
	2. Permintaai	n keterangan dari Kepala
	Desa 0 kali	
		n Peraturan Desa. 0 buah
		an aspirasi masyarakat 0 kal
Produk keputusan BPD tahun ini	Menyataka Desa 0 kali	n pendapat kepada Kepala
		nikan usul dan pendapat
		la Desa 0 kali
	APB Desa 0	ıasi efektivitas pelaksanaan kali
5 Damilihan dan Sungai Lambaga Kamasususkatan		
5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan		
Dasar hukum keberadaan Lembaga		
Kemasyarakatan Desa/LKD		
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	0 unit organis	sasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK		
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	0 unit organis	sasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK		
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,		
LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya		
mplementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK		
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	0 kegiatan	
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi		
anggota LKD/LKK		
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	0 kegiatan	
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Tidak	
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW,		
kelompok tani dan organisasi lainnya Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK		
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran		
Sukungan pembiayaan, personii dan ATK untuk Sekretanat EKD/EKK dan APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD		
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	0,00 %	
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi,		
Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK		
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK		
C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN		
4. Musicawanah Baranggaran Barahangunan Basa/Kalurahan/ Musicarahan adac/ kalurahan		
·	osuk di tingkat	I
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, term	asuk di tingkat	4 kali
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, term dusun dan lingkungan	asuk di tingkat	4 kali 60,00 %
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termadusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	asuk di tingkat	
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, term dusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	asuk di tingkat	60,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, term dusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan		60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, term dusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang		60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termi dusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang	gunan desa dan	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de	gunan desa dan	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de- Kelurahan	gunan desa dan esa dan	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang-orum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p	gunan desa dan esa dan	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p	gunan desa dan esa dan partisipatif	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya 5,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang i Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da	gunan desa dan esa dan partisipatif	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang pusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas se	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya 5,00 % 2,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p Jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas se Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyara	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya 5,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p Jsulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jsulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jsulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas sulusrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyaradesa/kelurahan	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p Jsulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jsulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jsulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas se Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyara Jsulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p Julan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Julan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Julan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Julan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas selasikurahan Julan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p Jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas sulusrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyara desa/kelurahan Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- erorum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p Jsulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jsulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jsulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas a Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyar desa/kelurahan Jsulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang I Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas se Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyara desa/kelurahan Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalan	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de- Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang dusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas sembang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyara desa/kelurahan Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalan APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termidusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang pusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan dan dimuat da Desa Jsulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jsulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas aluserahan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyar desa/kelurahan Jsulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalan APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada
lumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termitusun dan lingkungan lumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan lumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan lumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan lumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang pusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas alusarahan Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalan APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 2 . kegiatan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termitusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang i Jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas i Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan Rencana Kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas lari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalan APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 2 . kegiatan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termususun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang lusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas akusrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyar. Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi dasa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalan APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak selasil Musrenbang	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di n APB-Desa, suai dengan	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 2 . kegiatan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termususun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profi Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang-orum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang di Jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas si Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyar Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalan APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak senasil Musrenbang Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak senasil Musrenbang	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di n APB-Desa, suai dengan usrenbang	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 2 . kegiatan 1 . kegiatan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termususun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang-rorum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang di Jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat debesa Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas desa/kelurahan Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak senasil Musrenbang Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Mumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di n APB-Desa, suai dengan usrenbang	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada 2 . kegiatan 1 . kegiatan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termususun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Dengunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang-orum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan Pelelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang i Jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas si Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyar desa/kelurahan Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak senasil Musrenbang Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak senasil Musrenbang Jumlah kegiatan yang dilakanakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelur	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di n APB-Desa, suai dengan usrenbang a pemerintah ah ada sesuai	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 1 . kegiatan 1 . kegiatan 50,00 % 200,00 % 3 kegiatan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termutusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Pengunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang-orum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan Pelelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang i Jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas sebagai bahan dalam Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyar desa/kelurahan Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jumlah kegiatan yang diibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Mumlah kegiatan yang diibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fis	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di n APB-Desa, suai dengan usrenbang a pemerintah ah ada sesuai PB-Daerah	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 1 . kegiatan 1 . kegiatan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termususun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Pengunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang-orum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat de Desa Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas sekas/kelurahan Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPD/MD/K) Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPD/MD/K) Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPD/MD/K) Pemilikan Rencana Kerja Pembangunan Pendanan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalan APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesual hasil Mumlah masy	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di n APB-Desa, suai dengan usrenbang e pemerintah ah ada sesuai PB-Daerah Musrenbang	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 1 . kegiatan 1 . kegiatan 50,00 % 200,00 % 3 kegiatan 0 kegiatan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termususun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas simusungan dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyar desa/kelurahan Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RRPJMD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musmah kegiatan yang dilaksanakan oleh piakakanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musmah kegiatan yang dilaksanakan oleh piaka ketiga tanpa meliba	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di n APB-Desa, suai dengan usrenbang e pemerintah ah ada sesuai PB-Daerah Musrenbang	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 1 . kegiatan 1 . kegiatan 50,00 % 200,00 % 3 kegiatan 0 kegiatan 5,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termususun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah neserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de kelurahan Pelibatan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas sukusrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyar. Jesa/kelurahan Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalan APB-Desarh Kabupaten/Kota dan Provinsi Jumlah kegiatan yang diibakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil M Jumlah kegiatan yang diiaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakat aseuai ketentuan dalam APB-Desa Jumlah kegiatan	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di n APB-Desa, suai dengan usrenbang pemerintah ah ada sesuai PB-Daerah Musrenbang	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 1 . kegiatan 1 . kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 5,00 % 4,00 % 2,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termususun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan adata BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang i Jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas selasa/kelurahan Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang disulikan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diisulikan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalan APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jumlah kegiatan yang diisulikan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak se- asali Musrenbang diibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil M Jumlah kegiatan yang diiskanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang disetuju	gunan desa dan esa dan partisipatif elam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di n APB-Desa, suai dengan usrenbang e pemerintah ah ada sesuai PB-Daerah Musrenbang	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 1 . kegiatan 1 . kegiatan 5,00 % 200,00 % 3 kegiatan 0 kegiatan 5,00 % 4,00 %
Jumlah kendiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah kendiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah masyarakan Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang-orum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang i Jasulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jasulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jasulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas dusurenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyar desa/kelurahan Jasulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan (RKPJMD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang disulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalan APB-Dearah Kabupaten/kota, dan Provinsi Jumlah kegiatan yang disulkan masyarakat melaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk desa/kelurahan dalam APB-Desa Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh	gunan desa dan esa dan partisipatif elam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di n APB-Desa, suai dengan usrenbang e pemerintah ah ada sesuai PB-Daerah Musrenbang	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 1 . kegiatan 1 . kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 5,00 % 4,00 % 2,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, term dusun dan lingkungan Jumlah hehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Penggunaan Profii Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profii desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat de Desa Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas si dusarkelurahan Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang telaksanaannya tidak se- Jumlah kegiatan yang diisulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang telaksanaannya tidak se- Jumlah kegiatan yang disulkan masyarakat melaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil M Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil M	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di n APB-Desa, suai dengan usrenbang pemerintah ah ada sesuai PB-Daerah Musrenbang saat	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 1 . kegiatan 1 . kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 5,00 % 4,00 % 2,00 % 1,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, term dusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de- Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang il Jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibaha si Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyar Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas tari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Dearah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang telaksanaannya tidak senasii Musrenbang Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai kete	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di n APB-Desa, suai dengan usrenbang e pemerintah ah ada sesuai PB-Daerah Musrenbang saat unan yang saikan oleh	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 1 . kegiatan 1 . kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 5,00 % 4,00 % 2,00 % 1,00 %
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, term dusun dan lingkungan Jumlah hehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Penggunaan Profii Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profii desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat de Desa Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas si dusarkelurahan Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang telaksanaannya tidak se- Jumlah kegiatan yang diisulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang telaksanaannya tidak se- Jumlah kegiatan yang disulkan masyarakat melaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil M Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil M	gunan desa dan esa dan partisipatif alam RAPB- saat akatan untuk dibiayai di n APB-Desa, suai dengan usrenbang e pemerintah ah ada sesuai PB-Daerah Musrenbang saat unan yang saikan oleh	60,00 % 30,00 % 30,00 % 4,00 % Ya Ya Ya Ya 5,00 % 2,00 % 2,00 % 2 kegiatan Ada Ada Ada Ada 1 . kegiatan 1 . kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 5,00 % 4,00 % 2,00 % 1,00 %

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	0 Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	0 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	0 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	0 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	5 kegiatan
3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk	I .
Jumlah kelompok arisan	10 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	4 orang
Ada tidaknya dana sehat	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penbangunan tanah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas	
sosial/prasarana dan sarana	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan kebah.	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penstiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	Ada
	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan	nua
ingkungan lainnya	Tidak
1. Adat Istiadat	
Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Pernah Ada
Adat istiadat dalam upacara kematian	Tidak
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Tidak
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	Tidak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Tidak
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Pernah Ada
Adat istiadat dalam menjadikan bala penyaki dan bencana alam Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Pernah Ada
Adat istiadat dalam memulinkan nubungan antara alam semesta dengan manusia dan ingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	Aktif
	MANI
5. Sikap Dan Mental Masyarakat	
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	0 jenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	0 jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	0
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	0
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	0
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
	0 jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	0 jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan	0 kasus
sejenisnya. Disiridah karana kana kasua pungutan liar pamaragan dan sejanjanya	
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	0
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	1
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	0
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	0
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain	0
Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	1
uas wilayan besa/keluranan sangai luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi	0
sanyak lahan terlantar yang tidak dikelola perhiliknya/petani berdasi Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	1
sanyak lahan pekarangan di sekitar perumanan yang tidak dimanfaatkan Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	0
sanyak lanan tidur milik masyarakat yang tidak dimantaatkan lumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	1
lumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	0
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	1
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/keluranan tetapi masin dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	1
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	1
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada	
aat kelaparan dan kekeringan	1
	0
	0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	U
pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	1
pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	1
pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	1
pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	0 2
cangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi	0
kangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	1 0 2 0
kangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Kebiasaan masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi desulitan yang dihadapi masyarakat	1 0 2 0
kangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi desulitan yang dihadapi masyarakat KIII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN	1 0 2 0 0
kangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Kebiasaan masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi desulitan yang dihadapi masyarakat	1 0 2 0

B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN	
1. Posyandu	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	20
Jumlah kegiatan	10 Jenis
2. Kelompok Tani/Nelayan	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	7
Jumlah kegiatan	8 Jenis
3. Organisasi Perempuan	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	1
Jumlah kegiatan	3 Jenis
4. Organisasi Pemuda	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	4
Jumlah kegiatan	4 Jenis
5. Organisasi Profesi	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	2
Jumlah kegiatan	2 Jenis
6. Organisasi Bapak	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	1
Jumlah kegiatan	1 Jenis
<u> </u>	
7. Kelompok Gotong Royong	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	1
Jumlah kegiatan	2 Jenis
Samuel Registeri	2 001110
8. Posyantekdes	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	2
Jumlah kegiatan	2 Jenis
ournan regional	2 octilis
9. Organisasi Keagamaan	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	5
Jumlah kegiatan	7 Jenis
Junian Registan	7 Jenis
40 Bulus Tatanana (BT)	Ada
10. Rukun Tetangga (RT) Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	2
Jumlah kegiatan	4 Jenis
Junian Registan	4 061113
44. Buleun Manna (DM)	Ada
11. Rukun Warga (RW)	Ada Ada dan Aktif
Kepengurusan Buku Administrasi	Ada dan Aktii
Jumlah kegiatan	4 Jenis
ournan regiatan	4 001112
12. Radan Heaha Milik Doca (RHMDES)	Ada
12. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kepengurusan	Ada Ada Aktif
Repengurusan Buku Administrasi	Ada dan Aktif
Jumlah kegiatan	3 Jenis
- Comment (Comment)	O OCINO
13. LKMD/LPM/Sebutan Lain	Ada
13. LKMD/LPM/Sebutan Lain Kepengurusan	Ada Ada Aktif
Repengurusan Buku Administrasi	Ada dan Aktif
Jumlah kegiatan	3 Jenis
ournan regiatan	J Jellio
44. Bombordovgon den Konsishterson Kalvarra (BKK)	Ada
14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Ada dan Aktif
Konongurugan	Ada dan Aktif
Kepengurusan	
Buku Administrasi	7 Ionie
	7 Jenis
Buku Administrasi Jumlah kegiatan	
Buku Administrasi Jumlah kegiatan 15. Karang Taruna	Ada
Buku Administrasi Jumlah kegiatan 15. Karang Taruna Kepengurusan	Ada Ada dan Aktif
Buku Administrasi Jumlah kegiatan 15. Karang Taruna Kepengurusan Buku Administrasi	Ada Ada dan Aktif 2
Buku Administrasi Jumlah kegiatan 15. Karang Taruna Kepengurusan	Ada Ada dan Aktif
Buku Administrasi Jumlah kegiatan 15. Karang Taruna Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan	Ada Ada dan Aktif 2 5 Jenis
Buku Administrasi Jumlah kegiatan 15. Karang Taruna Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan 16. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	Ada Ada dan Aktif 2 5 Jenis Ada
Buku Administrasi Jumlah kegiatan 15. Karang Taruna Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan 16. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Kepengurusan	Ada Ada dan Aktif 2 5 Jenis Ada Ada Ada Ada
Buku Administrasi Jumlah kegiatan 15. Karang Taruna Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan 16. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Kepengurusan Buku Administrasi	Ada Ada dan Aktif 2 5 Jenis Ada Ada Ada Ada Ada dan Aktif 2
Buku Administrasi Jumlah kegiatan 15. Karang Taruna Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan 16. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Kepengurusan Buku Administrasi	Ada Ada dan Aktif 2 5 Jenis Ada Ada Ada Ada
Buku Administrasi Jumlah kegiatan 15. Karang Taruna Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan 16. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan	Ada Ada dan Aktif 2 5 Jenis Ada Ada dan Aktif 2 4 Jenis
Buku Administrasi Jumlah kegiatan 15. Karang Taruna Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan 16. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan 17. Lembaga Adat	Ada Ada dan Aktif 2 5 Jenis Ada Ada dan Aktif 2 4 Jenis Ada Ada dan Aktif 2 4 Jenis
Buku Administrasi Jumlah kegiatan 15. Karang Taruna Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan 16. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan	Ada Ada dan Aktif 2 5 Jenis Ada Ada dan Aktif 2 4 Jenis

Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 373.640.901,00
B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah	
Penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Kepala Desa kepada BPD	1
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat	10 jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	1
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	1
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	2 jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah	0 kasus

Rp 228.606.360,00

C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan

1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	
Gedung Kantor	-
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	
Listrik	
Air bersih	
Telepon	

1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	unit

buaii
unit
unit
unit

Baka / karimilibrasi / keperladakari	
Buku Data Inventaris	
Buku Data Aparat	
Buku Data Tanah Kas Desa	
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	
Buku Data Tanah	
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	
Buku Agenda Ekspedisi	

Buku Agerida Ekspedisi	
Buku Profil Desa dan Kelurahan	
Buku Data Induk Penduduk	
Buku Data Mutasi Penduduk	
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan	
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	

Buku Data Penduduk Sementara
Buku Anggaran Penerimaan
Buku Anggaran Penerimaan

Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan Buku Kas Umum Buku Kas Pembantu Penerimaan

Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan

2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD

Gedung Kantor

Jumlah ruang kerja

Balai BPD

Listrik

Air bersih

Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik	
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
lumlah mesin tik	
partial moon at	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
moon lax	
2.B. Administrasi BPD	
Buku-buku administrasi kegiatan BPD	
•	
Buku Buku Administrasi Keanggotaan	
Buku kegiatan BPD	
Buku himpunan peraturan desa	
Buku Lainnya	
Burka Euriniya	
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN	
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	
Alat tulis kantor	
Barang inventaris	Jenis
Buku administrasi	Jenis
Jenis kegiatan	Jenis
-	
Jumlah pengurus	Orang
Jumlah ruang kerja	Ruang
D DEMDINAAN DAN DENGAWASAN	I.
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	Ada
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan	Ada
kelurahan	1
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Ada
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan	Ada
serta BPD	Ada
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-	
	Ada
masing	
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan	4 kegiatan
lembaga kemasyarakatan	Rogistan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	2 kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	2 kegiatan
	Z Kegiatari
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	4 jenis
<u> </u>	
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan	0 kali
pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	J
,	
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kali
<u> </u>	0 kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	0 kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	0 kali 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan	1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan	1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi	1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	1 1 1 1 1 tegiatan 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan	1 1 1 1 1 tegiatan 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilaksanakan pemerintahan dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	1 1 1 1 1 tegiatan 1 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilaksanakan pemerintahan dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa	1 1 1 1 1 segiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	1 1 1 1 1 segiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa d	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewaijibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganana bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepada dena hurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggalangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota kapala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemisikinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanggulangan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi di kesa dan kelurahan Kegiatan pengendanan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman tekhis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman tekhis peny	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profii desa dan kelurahan Regiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profii desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kegala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perenca	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemisikinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanggulangan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi di kesa dan kelurahan Kegiatan pengendanan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman tekhis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman tekhis peny	1 1 1 1 1 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewaijibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penotapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Regiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerin	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pennegkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemperina sanksi atas penyempangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian pengahargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan Desa dan kelurahan Pemberian pengahargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan Pemberian pengaharganan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan Pelempahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga adat beserta h	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pennafaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Peedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan darah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan penabaga adat beserta hak dan kewajibannya d	1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian pengahargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan Desa dan kelurahan Pemberian pengahargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan Pemberian pengaharganan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan Pelempahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga adat beserta h	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pennafaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Peedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan darah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan penabaga adat beserta hak dan kewajibannya d	1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman palaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan kekgiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pensanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kesala desa dan kelurahan Regiatan penanganan bencana pedoman admini	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penangganan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan penagkat masing-masing Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, kepata dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/Kota kepada desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan kelurahan peraturan daerah kepada kepala desa dan kelurahan pengalan pendayan an peraturan dara pembangunan partisip	1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penangganan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penangkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan penjakasanan tugas pembantuan dari kabu	1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewaljibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penngdaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan delam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala d	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penangganan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penangkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan penjakasanan tugas pembantuan dari kabu	1 1 1 1 1

Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	0 jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	0 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah	0 kasus
4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan	
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	5 kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	7 kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	1 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa	0 kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan	0 kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	1 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	10 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	0 kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	3 kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	0 kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	0 kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	0 kali

KABUPATEN TANGGAMUS, MERBAU Kecamatan KLUMBAYAN BARAT Kabupaten KABUPATEN TANGGAMUS

<u>ROHADI</u> Kepala Desa

- Tembusan : 1. Camat KLUMBAYAN BARAT 2. Bupati KABUPATEN TANGGAMUS 3. Arsip